

 USD - US Dollar		 CNY - Chinese Yuan		 MYR - Malaysian Ringgit		 EUR - Euro		 JPY - Japanese Yen		 SGD - Singapore Dollar	 SAR - Saudi Arabia Riyal		
17.858,85	17.681,15	2.656,86	2.630,11	4.420,51	4.370,03	20.678,76	20.469,47	11.183,45	11.071,48	14.027,85	13.887,17	4.756,53	4.708,70
JUAL	BELI	JUAL	BELI	JUAL	BELI	JUAL	BELI	JUAL	BELI	JUAL	BELI	JUAL	BELI

Sumber : Bank Indonesia



Sumber : Bank Indonesia

PEMKOT MAKASSAR

Pembangunan Jembatan Barombong Terkendala Status Lahan



MUNAFRI ARIFUDDIN

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Makassar terus melakukan upaya mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Kembang Barombong, Kecamatan Tamalate.

Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala. Pada salah satu sisi lokasi pembangunan jembatan, terdapat lahan yang status kepemilikannya masih diperselisihkan sejumlah pihak.

Persoalan ini terungkap dalam rapat koordinasi terkait proyek pembangunan Jembatan Barombong yang dihadiri langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Kepala Kantor BPN/ATR Kota Makassar, Johannis Buapi serta jajaran terkait, belum lama ini.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, pembangunan Jembatan Barombong merupakan kebutuhan mendasak untuk menjawab persoalan kemacetan sekaligus memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah selatan Makassar. Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah merespon aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan kepadatan lalu lintas di jalur tersebut.

"Jembatan Barombong itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengurai kemacetan. Ini menjawab kebutuhan dan aspirasi warga, sehingga kami percepat pembebasan lahan," kata Appi, sapaan Munafri, Kamis (3/8/2026).

Dimana, terdapat tiga pihak yang

KANWIL DJP SULSELBARTRA

Terima Konsultasi DPRD Jeneponto Terkait PPh 21



AKING/UPEKS

TERIMA. Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, menerima kunjungan kerja koordinasi dan konsultasi Banggar DPRD Jeneponto di Aula Lantai 3 Kanwil DJP Sulselbartra.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) memberikan penjelasan terkait penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER) kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jeneponto.

Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, menegaskan penerapan mekanisme PPh Pasal 21 TER, bukan merupakan kebijakan baru yang ditujukan untuk menambah beban pajak wajib pajak.

"Ketentuan perpajakan ini bukan hal baru dan pada dasarnya tidak menimbulkan tambahan beban pajak baru bagi Wajib Pajak," katanya, saat menerima kunjungan kerja koordinasi dan konsultasi Banggar DPRD Jeneponto di Aula Lantai 3 Kanwil DJP Sulselbartra, pada Rabu (2/9/2026).

Pertemuan digelar untuk menyamakan persepsi mengenai penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPRD Kabupaten Jeneponto, Irmawati, mengatakan konsultasi dilakukan lantaran adanya perbedaan pemahaman terkait penguasaan PPh Pasal 21 atas tunjangan resmi yang diterima anggota DPRD pada Agustus 2026.

Menurutnya, pemotongan pajak oleh bendahara sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota dewan karena nominal pajak yang dipotong

Ke Halaman 5

Kunjungan Wisman Sulsel Tumbuh 77,18%

Bisnis Hotel Mulai Bergairah

MAKASSAR, UPEKS-- Kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Sulsel menunjukkan pertumbuhan signifikan pada Juli 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel mencatat sebanyak 2.415 kunjungan Wisman, meningkat 77,18% dibandingkan Juni 2026 yang hanya 1.363 kunjungan.

Kepala BPS Sulsel, Aryanto, mengatakan peningkatan tersebut menjadi indikasi mulai menguatnya aktivitas pariwisata di Sulsel. Wisman asal Malaysia mendominasi kunjungan dengan 1.022 orang, disusul wisatawan asal Tiongkok sebanyak 179 kunjungan.

"Pada Juli 2026 tercatat 2.415 kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan, naik 77,18 persen dibandingkan Juni 2026," papar Aryanto dalam konferensi pers melalui kanal YouTube resmi BPS.

Menguatnya kunjungan wisman turut diikuti peningkatan tingkat

penghunian kamar (TPK) hotel bintang. Pada Juli 2026, TPK hotel bintang tercatat 50,26% atau naik 0,76 poin persentase dibandingkan Juni yang berada pada level 49,50%.

Secara tahunan, TPK hotel bintang juga meningkat 2,54 poin persentase dibandingkan Juli 2025 yang tercatat sebesar 47,73%. Kenaikan terjadi pada hampir seluruh klasifikasi hotel bintang, kecuali hotel bintang tiga.

Kenaikan tahunan tertinggi tercatat pada hotel bintang satu sebesar 7,82 poin persentase, disusul hotel bintang dua yang tumbuh 7,15 poin persentase. Sementara secara bu-

Kunjungan Wisman Sulsel Juli 2026:



lanan, peningkatan TPK terjadi pada hotel bintang dua serta hotel bintang empat dan lima, masing-masing 4,47 poin dan 4,17 poin persentase.

Berbeda dengan hotel bintang, tingkat penghunian hotel non-bintang dan akomodasi lainnya justru turun secara bulanan. TPK pada Juli 2026 tercatat 20,07%, turun 0,70 poin persentase dari Juni 20,77%, meski secara tahunan masih tumbuh 1,18 poin persentase dari 18,89% pada Juli 2025.

Aryanto menambahkan, rata-rata lama menginap tamu hotel bintang di Sulsel pada Juli 2026 mencapai 1,38 malam. Durasi terlama tercatat pada hotel bintang empat dan lima 1,64 malam, sedangkan bintang tiga 1,30 malam. Angka ini turun 0,02 malam dibandingkan Juni dan 0,04 malam dibandingkan Juli 2025. (eky/rif)

Kalla 10K 2026 Siapkan 4.500 Slot Pelari

MAKASSAR, UPEKS-- KALLA kembali menggelar Kalla 10K 2026 dengan skala lebih besar dan kategori lomba yang lebih inklusif, dengan menyediakan 4.500 slot peserta. Ajang lari tersebut akan berlangsung di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Minggu (11/10/2026) mendatang.

Jumlah ini meningkat dibandingkan penyelenggaraan 2025 yang diikuti sekitar 3.000 pelari. Pendaftaran dibuka sejak 11 Agustus 2026 melalui situs kalla10k.com dan aplikasi Kallafriends. Tingginya antusiasme peserta membuat slot pendaftaran kian terbatas dan akan ditutup pada 6 September 2026.

Selain kategori 10K dan 5K, Kalla 10K 2026 menghadirkan kategori baru Family Run 2K. Kategori tersebut dirancang bagi keluarga yang ingin menikmati pengalaman berlari bersama, termasuk orang tua dengan anak berusia 6 hingga 12 tahun.

Ketua Panitia Kalla 10K 2026, Imam Asyâ€™ari, mengatakan penyelenggaraan tahun ini tidak hanya meningkatkan jumlah peserta, tetapi juga pengalaman yang diberikan kepada pelari. Menurutnya, kehadiran Family Run 2K menjadi upaya memperluas akses olahraga lari bagi masyarakat.

Menurut dia, rangkaian Kalla 10K tidak hanya berlangsung pada hari perlombaan. Panitia juga menyiapkan sejumlah program persiapan, termasuk Strength Program yang digelar beberapa kali menjelang race day. Program perdana telah berlangsung di Sky Arena Rooftop NIPAH Park, Senin (17/8/2026).



IST

KEMBALI DIGELAR. Ribuan pelari saat meramaikan Kalla 10K tahun 2025 lalu. Tahun ini, KALLA kembali menggelar Kalla 10K dengan menyediakan 4.500 slot peserta. Ajang lari tersebut akan berlangsung di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Minggu (11/10/2026) mendatang.

sung di Sky Arena Rooftop NIPAH Park, Senin (17/8/2026).

Kalla 10K 2026 menyediakan tiga kategori dengan karakter peserta berbeda. Kategori 10K diperuntukkan bagi pelari yang ingin menguji performa dengan

cut-off time (COT) 70 menit, sedangkan kategori 5K ditujukan bagi pelari pemula dan masyarakat umum dengan COT 90 menit. Adapun Family Run 2K menjadi pilihan bagi keluarga untuk berlari atau berjalan

santai bersama anak.

Tiket Kalla 10K dibanderol Rp280.000 untuk kategori 10K, Rp200.000 untuk 5K, dan Rp275.000 untuk Family Run 2K. Panitia juga menyiapkan hadiah podium, dengan juara

pertama 10K Race Umum Male dan Female masing-masing Rp17 juta, juara kedua Rp15 juta, dan juara ketiga Rp12 juta. Sementara kategori 10K Master dan 5K juga menyediakan hadiah bagi tiga besar. (*)

Peran BI Sulsel Menata Ekosistem Ekonomi Syariah

Dorong UMKM dan Pesantren Jadi Motor Penggerak

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki modal besar untuk terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Butta Angin Mammiri ini dinilai punya potensi pada sektor industri halal, UMKM, pesantren, pembiayaan syariah hingga instrumen keuangan sosial seperti wakaf.

Laporan: MUHAMMAD AKING
Kabupaten Gowa

Demikian disampaikan Rizki Ernadi Wimanda selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, saat memaparkan materinya dalam pelatihan Wartawan dan Media Engagement yang digelar di Pulau Dewata Bali, beberapa waktu lalu.

Menurut pria asli Surabaya, Jawa Timur ini, ekonomi syariah tidak cukup dikembangkan hanya dengan memperbanyak pelaku dan produk halal. Eko-

sistemnya harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari penguatan kapasitas pelaku usaha, sertifikasi dan peningkatan kualitas produk, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi, hingga perluasan pasar.

"Penguatan ekosistem ini butuh kolaborasi lintas pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, pesantren, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat," urai pria kelahiran 30 Mei 1971 silam ini.



DOKUPEKS

UMKM DAN PESANTREN REWAKO. KPw BI Provinsi Sulsel resmi memulai program UMKM dan Pesantren REWAKO pada akhir April 2026 lalu. Ini menjadi langkah strategis BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Peluang pengembangan tersebut semakin terbuka seiring besarnya potensi pasar halal global. Pada 2025, populasi muslim dunia mencapai sekitar 2 miliar jiwa atau 27,8% dari populasi global, dan diproyeksikan meningkat menjadi 2,8

miliar jiwa pada 2050.

Dari sisi pengeluaran, masyarakat muslim dunia tercatat mencapai sekitar 2,43 triliun dolar AS pada 2023, dan diproyeksikan menjadi 3,36 triliun dolar AS pada 2028, sementara aset keuangan syariah global diperkirakan

meningkat dari 4,93 triliun dolar AS menjadi 7,5 triliun dolar AS pada periode yang sama.

Potensi pasar ini membuat sejumlah negara seperti Malaysia, Inggris dan Thailand berlomba-lomba ambil posisi dalam ekosistem halal global. Indonesia sendiri menargetkan diri menjadi pusat industri halal dunia.

Khusus Sulawesi Selatan, lanjut alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini, memiliki peluang untuk turut ambil bagian dalam pasar tersebut melalui langkah strategis seperti penguatan UMKM dan pemberdayaan usaha pesantren.

Selama ini, banyak produk potensial lahir dari usaha kecil, tetapi kemampuan produksi saja belum cukup untuk membawa produk naik kelas. "Pelaku usaha

Ke Halaman 5

SYARIAH

BSN Perkuat Sinergi dengan Ekosistem Muhammadiyah



ALEX SOFJAN NOOR

PT Bank Syariah Nasional (BSN) terus memperluas penetrasinya di industri perbankan syariah dengan memperkuat ekosistem syariah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Bank BSN untuk meningkatkan peran dan daya saingnya di tengah pertumbuhan industri keuangan syariah nasional.

Penguatan ekosistem dilakukan dengan memperluas sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, komunitas, serta institusi yang memiliki keterkaitan dengan sektor syariah. Melalui kolaborasi, BSN berupaya menghadirkan layanan keuangan syariah yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terbaru, bank ini menggelar Muhammadiyah Ecosystem Acceleration 2026 di Lampung, yang bertujuan mempercepat akuisisi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM).

Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor mengatakan Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Sumatera sekaligus menyimpan potensi besar bagi pengembangan ekosistem AUM, mulai dari perguruan tinggi, rumah sakit, sekolah, hingga jaringan bisnis UMKM.

"Hubungan Bank BSN dan Muhammadiyah bukan sekadar kemitraan bisnis biasa. Kami ingin hadir bukan sekadar sebagai penyedia produk perbankan, melainkan sebagai mitra ekosistem yang tumbuh bersama Muhammadiyah secara berkelanjutan," kata Alex dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).

Menurut Alex, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah nota kesepahaman dan kerja sama antara Bank BSN dan Muhammadiyah. Kolaborasi dimulai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada 24 Februari 2026 dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Syariah pada 12 Juni. (eky)

LPS

Dorong Bank Kurangi Special Rate



ANGGITO ABIMANYU

Ketua Dewan Komisiner LPS Anggito Abimanyu menyebut, saat ini masih ada porsi simpanan yang mendapatkan suku bunga khusus di atas tingkat bunga penjaminan. Kondisi tersebut terutama terjadi pada depositan besar, seperti rekening pemerintah dan korporasi besar. "Kalau suku bunga atau debitur besar itu diberikan suku bunga khusus maka tentu itu akan menghambat intermediasi," ujar Anggito dalam Sarasehan Ekonom INDEF, Kamis (3/9/2026).

Ia menjelaskan, pemberian special rate pada simpanan berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund) perbankan. Pada gilirannya, itu dapat mendorong bank menyesuaikan suku bunga kredit sehingga ruang perbankan untuk menyalurkan pembiayaan menjadi lebih terbatas.

Anggito menyebut, sekitar 30% simpanan masih memperoleh suku bunga khusus. Porsi tersebut menjadi perhatian LPS dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), terutama karena dapat membuat pergerakan suku bunga pasar terdistorsi. Namun, LPS pada prinsipnya tak punya mandat untuk memaksa bank agar seluruh suku bunga simpanan mengikuti tingkat bunga penjaminan.

Sebab, tingkat bunga penjaminan merupakan batas suku bunga yang digunakan dalam perhitungan penjaminan simpanan, bukan instrumen untuk mengatur harga simpanan perbankan. Meski begitu, LPS terus melakukan komunikasi dengan bank dan depositan besar agar pemberian special rate dapat dikurangi. (eky)

BSI Akselerasi Pembiayaan Rumah Subsidi ASN

Masifkan Sosialisasi KPR Sejahtera FLPP

MAKASSAR, UPEKS -- PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung Program Perumahan Nasional bagi para abdi negara.

Melalui sinergi strategis bersama Kementerian Agama (Kemag) RI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta BP Tapera, BSI menggelar sosialisasi masif KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) guna memfasilitasi pegawai Kemenag, yang memenuhi kriteria penerima manfaat agar dapat memiliki hunian pertama yang layak, berkualitas, dan terjangkau.

Program sosialisasi FLPP kepada pegawai Kemenag merupakan bentuk perkuat sinergi inter-kementerian dan dukung transformasi Danantara Indonesia lewat layanan inklusif berskala nasional.

Hingga akhir Juli 2026, BSI berhasil mengukuhkan posisinya sebagai peringkat ke-1 secara nasional dalam persentase pencapaian target penyialuran unit FLPP tahun 2026, yakni mencapai 70% dari target tahunan sebesar 3.283 unit.

Secara akumulasi sejak merger pada 2021 hingga Juli 2026, BSI telah menyalurkan KPR FLPP

sebanyak 25.465 unit rumah dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp 3,6 Triliun. Adapun secara historis sejak tahun 2012, kontribusi pembiayaan rumah subsidi BSI secara keseluruhan telah menembus 67.686 unit dengan total nilai Rp 8,9 Triliun di seluruh Indonesia.

Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy, menegaskan, pemenuhan kebutuhan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Kemenag merupakan prioritas utama dalam ekosistem pembiayaan retail BSI.

"BSI hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan syariah, tetapi juga sebagai mitra tumbuh bersama dalam mewujudkan impian seluruh abdi negara memiliki hunian yang layak. Hasil survei kami menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dari pegawai Kemenag. Ini adalah amanah besar bagi BSI untuk terus Melayani Sepenuh Hati dengan menyediakan solusi keuangan syariah yang transpar-



AKINO/UPEKS

SUBSIDI. Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy dalam sosialisasi masif KPR Sejahtera FLPP guna memfasilitasi pegawai Kemenag, yang memenuhi kriteria penerima manfaat agar dapat memiliki hunian pertama yang layak, berkualitas, dan terjangkau.

an, cepat, dan menyejahterakan," ujar Erwan dalam keterangan resminya, Kamis (3/9/2026).

Guna memberikan pengalaman kemudahan secara langsung, BSI turut menghadirkan inisiatif pro-

G20 Dorong Stabilitas Ekonomi dan Investasi

MAKASSAR, UPEKS -- Stabilitas ekonomi dan kepastian kebijakan menjadi fondasi penting untuk mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat pertumbuhan dunia usaha di tengah ketidakpastian global.

Hal tersebut disampaikan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 atau G20 FMCBG di Amerika Serikat, 31 Agustusâ€"1 September 2026.

Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi global melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan inovasi.

Delegasi Indonesia dipimpin Filianingsih Hendarta bersama Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung, serta dihadiri negara anggota G20, sejumlah negara undangan dan organ-



AKINO/UPEKS

STABILITAS. Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 atau G20 FMCBG di Amerika Serikat, 31 Agustusâ€"1 September 2026.

isasi internasional.

Menurut Filianingsih, BI menekankan pentingnya menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkau melalui asesmen yang komprehensif dan forward-looking. Kerangka kebijakan moneter juga perlu terus beradaptasi dengan se-

makin terintegrasinya keuangan global dan pesatnya digitalisasi, sehingga diperlukan bauran kebijakan melalui sinergi moneter, stabilisasi nilai tukar, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Selain itu, komunikasi kebijakan yang jelas, konsisten, dan kredibel dinilai penting untuk menjaga ekspektasi pelaku ekonomi sekaligus meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

G20 memandang perekonomian global masih resilien dengan dukungan kebijakan yang menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan. Namun, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, seperti ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan dan pasokan energi, tekanan inflasi, tingginya utang, serta volatilitas pasar keuangan.

G20 mendorong sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang terkalibrasi, reformasi struktural, peningkatan investasi dan inovasi, serta pen-

guatan dan diversifikasi rantai pasok untuk meningkatkan pertumbuhan potensial.

Investasi pada kecerdasan artifisial (AI) turut menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan produktivitas dan menciptakan sumber pertumbuhan baru. Pemanfaatan AI perlu dibarengi penguatan ketahanan sistem keuangan dan keamanan siber. G20 juga mendorong kerja sama dalam literasi keuangan, penanganan fraud dan scam, isu utang, serta kolaborasi dengan sektor swasta.

Pertemuan tersebut menghasilkan G20 Chair's Statement yang merangkum hasil pembahasan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mengenai berbagai prioritas Finance Track di bawah Presidensi G20 Amerika Serikat. (eky)

BRI Salurkan Rp1.235 Triliun Kredit ke UMKM



IST

TUMBUH. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyalurkan kredit kepada segmen UMKM mencapai Rp1.235,4 triliun atau tumbuh 8,6% secara tahunan (yoy).

MAKASSAR, UPEKS -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mempertahankan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi utama bisnis perseroan. Hingga akhir Triwulan II 2026, kredit BRI kepada segmen UMKM mencapai Rp1.235,4 triliun atau tumbuh 8,6% secara tahunan (yoy).

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, mengatakan porsi kredit UMKM tersebut mencapai sekitar 75,1% dari keseluruhan portofolio kredit dan pembiayaan BRI Group. Besarnya porsi tersebut menunjukkan diversifikasi bisnis yang dilakukan perseroan tidak mengubah fokus BRI terhadap ekonomi kerakyatan.

"BRI tetap konsisten menjadikan UMKM sebagai core business. Kami percaya pertumbuhan BRI harus berjalan beringan dengan pertumbuhan pelaku usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat," kata Hery.

Menurutnya, penguatan segmen consumer, small-medium-commercial, corporate, hingga pengembangan new core dilakukan untuk menciptakan struktur bisnis yang semakin terdiversifikasi. Namun, UMKM tetap menjadi fondasi utama pertumbuhan perseroan, termasuk melalui perluasan akses pembiayaan dan penguatan kapasitas pelaku usaha.

Selain pembiayaan, BRI juga memperkuat pemberdayaan UMKM secara end-to-end melalui berbagai program. Hingga Juni

2026, Desa BRILiaN telah menjangkau lebih dari 5.700 desa binaan, sementara program Klasterku Hidupku mencakup lebih dari 44 ribu klaster usaha dan platform digital LinkUMKM menjangkau sekitar 17,3 juta pelaku UMKM.

Pendampingan juga dilakukan melalui Rumah BUMN yang hingga Juni 2026 telah melibatkan sekitar 596 ribu pelaku UMKM. Upaya tersebut melengkapi peran BRI dalam memperluas pembiayaan, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, BRI menyalurkan KUR sebesar Rp103,8 triliun kepada lebih dari 2 juta debitur. Secara kumulatif sejak 2015 hingga Juni 2026, penyaluran KUR BRI mencapai Rp1.539 triliun kepada 48,4 juta nasabah.

Hery menegaskan, pembiayaan dan pemberdayaan merupakan satu kesatuan dalam mendorong UMKM naik kelas. "Kami ingin menciptakan siklus pertumbuhan yang berkelanjutan: UMKM memperoleh akses keuangan, mendapatkan pemberdayaan dan pendampingan, meningkatkan kapasitas usahanya, kemudian naik kelas dan semakin terintegrasi ke dalam ekosistem ekonomi yang lebih besar," pungkasnya. (eky)

Pemimpin Umum: Buyung Maksum.

Wakil Pemimpin Umum: Muhammad Akbar.

Pemimpin Redaksi: H Abdul Jabbar

Sekretaris Redaksi: Meiske Wagiu. **Redaktur Pelaksana:** Arifuddin. **Staf Redaksi:** Sukawati, Hafsa Maharani, Muhajir.

Fotografer: Herwin Gunadi. **Online:** Syamsuddin Yoko, Paris M Ali, Mahatir Mahbub. **Pracetak:** Rahmat (Kepala), Ela Maspoer.

Reporter: Masjaya, Muh. Aking, Asrul Mustafa, Asmiati.

Wartawan Daerah: Maros: Alfi. **Pangkep:** Syahrir. **Barru:** Wahyudin. **Parepare:** -. **Sidrap:** Lital. **Enrekang:** Sry Yanti Ningsih. **Toraja/Toraja Utara:** Pinrang: Syahrul Calu, Mustafa S. Bone. **Randil. Sinjai. Awal. Wajo-Soppeng.. Luwu:** Echa. **Palopo:** -. **Lutra:** -. **Lutim:** Nasrun Majid. **Gowa:** Samsufian. **Takalar:** Jaharuddin. **Jeneponto:** Arifuddin Lau. **Bantaeng:** Irwan. **Bulukumba:** H. Asparwandi, Supri. **Selayar:** Syahrullah S.P.d. **Sulbar:** Majene: Ali Muhtar. **Mamasa:** -. **Mamuju:** . **Sultra:** Kolaka: Philips Nazareth.

Alamat Redaksi: Fajar Graha Pena Makassar L.L.III Jl Urip Sumoharjo No. 20 Telp. (0411) 457457 Fax. (0411) 456626 Makassar, <http://www.upeks.co.id>, e-mail: redaksi_upeks@yahoo.co.id, e-mail ikekan@yahoo.co.id, upeksiklan@yahoo.co.id, upeksiklin@gmail.com

Percetakan: PT Fajar Makassar Grafika, Jalan Pattene Raya No. 1 Makassar. Telp. (0411) 8955360 - 085102238913, **Harga Langganan:**Rp80.000/bulan (dalam Kota). Luar Kota Tambah Ongkos Kirim. **Iklan Umum BW:** Rp36.000/mm/kolom, **FC:** Rp45.000/mm/kolom, **Iklan Mungil BW:** Rp10.000/mm/kolom, **FC:** Rp15.000/mm/kolom, **Iklan Duka Cita BW:** Rp10.000/mm/kolom, **FC:** Rp15.000/mm/kolom, **Advertorial/Seremoni BW:** Rp10.000/mm/kolom, **FC:** Rp16.000/mm/kolom.

HARIAN
Ujungpandang Ekspres

BACAAN PEBISNIS SUKSES

Penerbit: PT Fajar Ujungpandang Intermedia.

Pendiri: HM Alwi Hamu. **Pembiina:** H Syamsu Nur, Zulkifli Gani Ottho. **Komisaris Utama:** DR Mohammad Hatta Alwi Hamu SE MSI. **Komisaris:** HA. Syafuddin Makka, Silahuddin Genda, Andi Tenri Bilang Radisyah Melati, Alfiansyah Zugito SH MH. **Direktur Utama:** Buyung Maksum. **Direktur:** Muhammad Akbar. **Manajer Keuangan:** Fitriyanti Solong. **Asisten Manager Keuangan:** Edi. **Manager Sirkulasi:** Ibrahim. **Manager Umum/HRD:** H Muchtar Arifuddin. **Manager Iklan:** Rusli Siri.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Fajar Graha Pena Makassar L.L.III Jl Urip Sumoharjo No. 20 Telp. (0411) 457457 Fax. (0411) 456626 Makassar, <http://www.upeks.co.id>, e-mail: redaksi_upeks@yahoo.co.id, e-mail ikekan@yahoo.co.id, upeksiklan@yahoo.co.id, upeksiklin@gmail.com

Biro Pemasaran Daerah: Maros: Alfi. **Pangkep:** H. Syukur. **Barru:** Wahyudin. **Parepare:** Syahruruddin. **Sidrap:** Anto. **Enrekang:** Syukur. **Toraja/Toraja Utara:** -. **Pinrang:** Mustafa S. Bone. **Randy, Sinjai:** Andi Ancu. **Wajo:** Syahrullah. **Soppeng:** Amin Rais. **Luwu:** -. **Palopo:** -. **Lutra:** -. **Lutim:** Nasrun Majid. **Gowa:** Samsufian. **Takalar:** I Wayan. **Jeneponto:** H. Empo Ledeng. **Bantaeng:** Irwan. **Bulukumba:** H. Asparwandi. **Selayar:** Mulwansyah. **Sulbar:** Majene: Ali Muhtar. **Mamasa:** Leonardo. **Mamuju:** Lalu Hartana. **Sultra:** Kolaka: Philips Nazareth.

BANTAENG

Bupati Harap Pilkades PAW Pattallassang Demokratis dan Kondusif



HADIRI. Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, saat menghadiri pelaksanaan Pilkades PAW di Aula Desa Pattallassang, Rabu (2/9/2026

BUPATI Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin meminta pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Pilkades PAW) Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, berlangsung demokratis, aman, tertib dan kondusif. Hal itu disampaikan saat menghadiri pelaksanaan Pilkades PAW di Aula Desa Pattallassang, Rabu (2/9/2026).

Bupati Fauzy Nurdin mengatakan, pelaksanaan Pilkades PAW telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari proses seleksi, wawancara hingga penetapan calon kepala desa. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif hingga seluruh rangkaian pemilihan selesai.

Bupati juga mengapresiasi dukungan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengamankan jalannya Pilkades PAW. Pengamanan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pemilihan berlangsung lancar dan memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam kesempatan itu, Fauzy Nurdin berharap pemilihan tersebut menghasilkan kepala desa yang peduli serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Desa Pattallassang. Sebanyak 102 pemilih yang memiliki hak suara juga diminta menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.

"Kami berharap pelaksanaan Pilkades PAW ini dapat menghasilkan kepala desa yang benar-benar peduli dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Desa Pattallassang," katanya.

Fauzy Nurdin juga mengingatkan tiga calon kepala desa agar berkompetisi secara sehat dan menghindari praktik politik uang. Menurutnya, kepala desa merupakan pelayan masyarakat sehingga proses pemilihannya harus berlangsung secara jujur dan demokratis.

"Jangan sampai ada money politics. Saya bisa melihat dan merasakan, banyak pemimpin yang terpilih tanpa money politics. Itulah pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat," ujarnya. (lpa/rif)

BONE

Prajurit Yonarmed 21/Kawali Bantu Warga Panen Padi



PANEN PADI. Prajurit Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 21/Kawali turun langsung ke sawah memanen padi bersama warga lokal di wilayah Desa Bulu Allamporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.

PENGELOLAN lahan pertanian seluas tiga hektar yang ada di Batalyon Armed 21/Kawali, menjadi kemandirian dan perjuangan TNI bersama rakyat mensukseskan panen padi.

Sekitar 15 prajurit Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 21/Kawali turun langsung ke sawah memanen padi bersama warga lokal di tengah tanaman musim kemarau ekstrem yang melanda wilayah Desa Bulu Allamporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone tersebut, belum lama ini.

Fenomena kekeringan parah yang menerjang belakangan ini berdampak signifikan pada hasil produksi.

Jika biasanya lahan tersebut mampu menyum bang 49 hingga 50 karung per musim panen dari siklus dua kali panen, setahun kali ini hasilnya merosot ke angka 30-an karung.

Hasil panen dari lahan Batalon barek coklat ini berkontribusi dalam menjaga pasokan pasar daerah.

Danyon Armed 21/Kawali, Letkol Arm Rianto Hartomo, S.Sos., M.I.P., menegaskan bahwa aksi ini merupakan bukti nyata sinergi TNI Angkatan Darat dalam mengawal program strategis pemerintah di sektor ketahanan pangan nasional.

"Kehadiran prajurit di lapangan tak sekadar membantu proses fisik pemanenan, tetapi juga memberikan suntikan motivasi bagi petani agar tetap tangguh menghadapi anomali iklim," ungkapnya.

Guna mendukung program Ketahanan Pangan (Ketapang) secara berkelanjutan, Yonarmed 21/Kawali tidak hanya berfokus pada komoditas padi.

Satuan ini aktif mengembangkannya lewat budidaya hortikultura beragam, seperti tanaman jagung, ubi jalar, hingga pembibitan daun seledri.

Hasil dari pengelolaan sektor ketahanan pangan ini dialokasikan secara akuntabel untuk pembenahan pangkalan dan fasilitas internal satuan, sekaligus menyokong berbagai agenda pembinaan prajurit dan persit serta pemeliharaan satuan secara mandiri. (*)

■ Dekatkan Akses Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat Kepulauan

Bupati Takalar Groundbreaking Pembangunan Kantor Kecamatan Tanakeke

TAKALAR, UPEKS—Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye meletakkan batu pertama (Groundbreaking) pembangunan Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Rabu (2/9/2026).

Pembangunan ini menjadi langkah Pemda memperkuat pelayanan pemerintahan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Prosesi peletakan batu pertama menandai dimulainya pembangunan fasilitas pemerintahan yang diharapkan dapat mendekatkan akses pelayanan administrasi kepada masyarakat Tanakeke.

Keberadaan kantor kecamatan yang representatif dinilai penting untuk mendukung efektivitas pelayanan publik di wilayah kepulauan terluar Takalar. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat Pemkab Takalar.

Hadir pula Camat Kepulauan Tanakeke, Bostan Tika, para kepala desa se-Kecamatan Kepulauan Tanakeke, serta unsur pengamanan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kehadiran mereka memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif.

Dalam sambutannya, Daeng Manye mengatakan pembangunan kantor kecamatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur publik.

Fasilitas itu diharapkan mampu memperpendek rentang kendali pelayanan birokrasi bagi masyarakat kepulauan. Menurutnya,

keberadaan kantor kecamatan yang lebih representatif akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan.

Warga diharapkan tidak lagi menghadapi perjalanan laut yang panjang dan menantang hanya untuk mengurus administrasi kependudukan maupun pelayanan dasar lainnya. Pembangunan kantor ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat yang selama ini mengharapkan fasilitas pemerintahan yang layak.

Namun, proses pembangunan juga menghadapi tantangan logistik, terutama dalam pengiriman material bangunan ke wilayah kepulauan, sehingga diperlukan pengawasan dan komitmen pelaksana untuk menjaga kualitas serta ketepatan waktu pengerjaan.

Pemkab Takalar berharap sinergi antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kontraktor, pengawas teknis, dan unsur keamanan terus terjaga hingga pembangunan rampung.

Selain menjadi pusat pelayanan administrasi, kantor baru tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat Kepulauan Tanakeke. (jah/rif)

Wabup Bantaeng Terima Tim Summer Program UNHAS-KU

BANTAENG, UPEKS—Wakil Bupati (Wabup) Bantaeng, Sahabuddin menyambut Tim Summer Program "UNHAS-KU" (Universitas Hasanuddin-Kanazawa University) 2026 di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bantaeng, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program yang berlangsung selama satu minggu, 2-7 September 2026 di Bantaeng. Summer Program "UNHAS-KU" 2026 diselenggarakan Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Kanazawa University, Jepang.

Program ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman akademik sekaligus mengenal potensi daerah dan kehidupan masyarakat selama berada di Bantaeng.

Dosen sekaligus peneliti Departemen Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unhas, Saaduddin, mengatakan program tahun ini diikuti 27 peserta yang terdiri atas mahasiswa, staf, dan pendamping.

Peserta berasal dari Unhas dan Kanazawa University. Dari Kanazawa University terdapat 13 mahasiswa yang terdiri atas 11 perempuan dan dua laki-laki. Selain itu, empat mahasiswa internasional Unhas dari Nigeria, Irak, Somalia, dan Pakistan turut mengikuti program tersebut.

Sementara dari Unhas lokal, peserta terdiri atas tiga mahasiswa dan tiga staf. Mereka juga didampingi empat orang

yang turut mendukung pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan selama peserta berada di Kabupaten Bantaeng.

Saaduddin menjelaskan, Summer Program "UNHAS-KU" merupakan tahun kedua pelaksanaan dari Bantaeng. Program ini kembali digelar setelah mendapat respons positif dari Pemkab Bantaeng, dengan jumlah mahasiswa Kanazawa University yang bertambah dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.

Wabup Bantaeng menyambut baik pelaksanaan program tersebut dan mengapresiasi Unhas serta Kanazawa University. Menurutnya, kehadiran mahasiswa dari berbagai negara dan perguruan tinggi menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi Bantaeng sekaligus membuka ruang pertukaran pengetahuan, budaya, dan pengalaman akademik.

"Pemerintah Kabupaten Bantaeng menyambut baik pelaksanaan program ini. Kehadiran mahasiswa dari Kanazawa University dan mahasiswa internasional Unhas menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan potensi Bantaeng sekaligus membangun hubungan dan jejaring akademik yang lebih luas," ujarnya.

Sahabuddin berharap, kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga bagi peserta serta memperkuat kolaborasi Pemkab Bantaeng, Unhas, dan Kanazawa University pada masa mendatang. (lpa/rif)



TERIMA. Wabup Bantaeng, Sahabuddin, saat menerima Tim Summer Program "UNHAS-KU" 2026 di Rujab Bantaeng, Rabu (2/9/2026).



GROUNDBREAKING. Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye meletakkan batu pertama (Groundbreaking) pembangunan Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Rabu (2/9/2026).

Pastikan Ketersediaan Air, Pemkab Pinrang Petakan Sumber Air Baku untuk Masyarakat

PINRANG, UPEKS—Upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air minum yang layak dan berkelanjutan, terus dilakukan.

Salah satunya melalui pemetaan potensi sumber air yang nantinya dapat dikembangkan untuk mendukung pelayanan air minum bagi masyarakat.

Melalui Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Perumukiman (AMPLP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (Bimacipta) Kabupaten Pinrang, pemerintah daerah melakukan peninjauan sejumlah sumber air di Desa Basseang, tepatnya di Dusun Pasaparang dan Batu Papan, Rabu (2/9/2026).



SUMBER AIR. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (Bimacipta) Kabupaten Pinrang, pemerintah daerah melakukan peninjauan sejumlah sumber air di Desa Basseang, tepatnya di Dusun Pasaparang dan Batu Papan, Rabu (2/9/2026)

si fisik sumber air, debit dan ketersediaan air, keberlangsungan pasokan hingga kondisi lingkungan di sekitar lokasi.

Hal ini penting dilakukan agar sumber air yang nantinya dikembangkan benar-benar mampu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Hasil peninjauan tersebut akan menjadi salah satu bahan bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menentukan langkah pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), termasuk menentukan sumber air yang paling mungkin-

kan untuk dikembangkan berdasarkan kondisi wilayah dan kebutuhan pelayanan.

Dengan perencanaan yang dilakukan sejak awal melalui data lapangan yang memadai, pengembangan SPAM diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Masyarakat nantinya diharapkan memperoleh akses air minum yang lebih mudah, aman dan berkesinambungan tanpa mengabaikan kondisi lingkungan serta kemampuan sumber air dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang. (*)

Wujudkan PAUD HI, Dinas Dikbud Enrekang MoU Lintas Sektor



PEMENUHAN INDIKATOR. Upaya mewujudkan layanan pendidikan anak usia dini yang menyeluruh di Kabupaten Enrekang terus diperkuat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Enrekang menggelar rapat koordinasi sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) lintas sektor dalam rangka pemenuhan indikator Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).

ENREKANG, UPEKS—Upaya mewujudkan layanan pendidikan anak usia dini yang menyeluruh di Kabupaten Enrekang terus diperkuat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Enrekang menggelar rapat koordinasi sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) lintas sektor dalam rangka pemenuhan indikator Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang, Selasa (1/9/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Penandatanganan MoU melibatkan 11 organisasi perangkat daerah (OPD), Kementerian Agama, Camat Enrekang, TP PKK Kabupaten Enrekang, Bunda PAUD, Pengawas TK, serta kepala satuan PAUD HI.

Selain memperkuat sinergi

antarinstansi, rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap capaian lapangan indikator PAUD HI pada satuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Enrekang.

Ketua TP PKK Kabupaten Enrekang sekaligus Bunda PAUD, Ratnawati Muchlis, menegaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja.

Menurutnya, anak merupakan amanah sekaligus harapan masa depan bangsa. Karena itu, PAUD HI harus menjadi wadah yang memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara utuh, bukan hanya dari sisi pendidikan.

"Anak-anak adalah amanah dan harapan masa depan bangsa. PAUD HI bukan sekadar tempat belajar, melainkan wadah yang merawat tumbuh kembang anak secara menyeluruh mulai dari kesehatan, gizi, pendidikan, per-

lindungan, hingga kesejahteraan sosial," kata Ratnawati.

Ia menekankan, persoalan tumbuh kembang anak membutuhkan kerja bersama. Pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga kesejahteraan sosial harus berjalan beriringan.

"Tugas mulia ini tidak bisa kita pikul sendirian. Pendidikan tidak hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan, kesehatan tidak hanya urusan Dinas Kesehatan, dan perlindungan tidak hanya beban Dinas Sosial. PAUD HI mengajarkan kita: setiap sektor adalah jaringan pengaman bagi anak," tegasnya.

Melalui MoU tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat bergerak dalam satu irama sesuai tugas dan kewenangannya.

Dinas Pendidikan memastikan layanan pembelajaran yang berkualitas. Dinas Kesehatan berperan dalam pemantauan pertumbuhan dan kesehatan anak, sementara Dinas Sosial memperkuat aspek perlindungan dan kesejahteraan anak.

Ditingkat lapangan, pemerintah desa dan kelurahan diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan layanan PAUD HI berjalan. Sementara masyarakat dan orang tua ditempatkan sebagai mitra utama dalam pengawasan dan pemenuhan kebutuhan anak.

Ratnawati menegaskan, penandatanganan MoU tersebut jangan berhenti sebagai kegiatan seremonial semata.

"Penandatanganan ini bukan sekadar seremonial, melainkan janji kita kepada anak-anak: bahwa mereka akan tumbuh di lingkungan yang peduli, terintegrasi, dan saling menguatkan," ujarnya. (sry)

Wajo Jadi Tuan Rumah Penutupan Porprov Sulsel XVIII

■ Dipercaya Jadi Venue Pertandingan 22 Cabor



WAJO, UPEKS-- Kabupaten Wajo ditetapkan sebagai lokasi penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulsel XVIII 2026. Keputusan ini disepakati dalam pertemuan tingkat provinsi yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulsel.

Porprov Sulsel XVIII dijadwalkan berlangsung pada 7-14 November 2026. Kabupaten Bone ditetapkan sebagai lokasi pembukaan, sedangkan Wajo dipercaya menjadi lokasi penutupan pesta olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

Sekretaris KONI Wajo, Muhammad Askar membenarkan penetapan tersebut. Ia mengatakan keputusan mengenai lokasi pembukaan dan penutupan



TUAN RUMAH PENUTUPAN. Kabupaten Wajo ditetapkan sebagai lokasi penutupan Porprov Sulsel XVIII 2026. Keputusan ini disepakati dalam pertemuan tingkat provinsi yang berlangsung di Ruang Rapat Dispora Sulsel.

Porprov Sulsel XVIII telah ditetapkan dalam pertemuan

tingkat provinsi. "Betul, sudah ditentukan lo-

kasi pembukaan dan penutupan Porprov Sulsel ke-18. Di Bone

pembukaan, Wajo penutupan," katanya di Sengkang, Kamis (3/9/2026).

Selain menjadi lokasi penutupan, Wajo juga dipercaya menjadi venue pertandingan 22 cabang olahraga (cabor). Yakni, akuatik, sepak takraw, bola basket, tenis meja, bulu tangkis, petanque, gateball, tenis lapangan, balap motor, pencak silat, wushu, kempo, yongmoodo, tinju, taekwondo, binaraga, muaythai, softball, bola tangan, hoki, sepak bola dan berkuda.

Sementara itu, Bone mendapat jatah 26 cabor sekaligus menjadi lokasi pembukaan Porprov. Untuk sepak bola, pertandingan dibagi dalam dua pool, yakni Pool A di Bone dan Pool B di Wajo. Cabor berkuda dan panahan dijadwalkan berlangsung di Bone, sementara nomor equestrian berkuda digelar di Wajo.

Askar mengatakan, KONI Wajo

bersama Pemkab Wajo mulai mematangkan persiapan teknis sebagai tuan rumah. Persiapan mencakup venue pertandingan, fasilitas pendukung, akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan kontingen. "Sementara kami siapkan semua sembari terus berkoordinasi dengan Pemkab Wajo dan KONI Provinsi serta Pemprov Sulsel," ujarnya.

Dukungan anggaran juga disiapkan Pemkab Wajo melalui parsial APBD Perubahan 2026 sebesar Rp7,5 miliar. Anggaran ini terdiri atas Rp5,5 miliar yang dihibahkan kepada KONI Wajo untuk pembinaan atlet dan keikutsertaan kontingen serta Rp2 miliar untuk pembenahan venue olahraga. Dengan ditetapkannya Wajo sebagai lokasi penutupan sekaligus venue 22 cabor, pembenahan fasilitas pertandingan menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan. (*)

Dorong UMKM dan Pesantren Jadi Motor Penggerak

► dari Halaman 1

butuh sertifikasi, manajemen yang lebih baik, pembiayaan, pendampingan, branding serta akses pasar. Pada posisi inilah Bank Indonesia hadir, termasuk memfasilitasi sertifikasi halal," kata Rizki.

Selain itu, BI juga mencoba strategi pemberdayaan usaha dimana pelaku usaha didorong menghasilkan produk yang memenuhi standar halal, mandiri dalam membangun bisnis, meningkatkan kualitas, memanfaatkan teknologi, serta memperluas pasar dari tingkat lokal hingga global. Semua itu dilakukan melalui berbagai program seperti UMKM REWAKO, REWAKO Ekspor, Modest Fashion Bootcamp dan IKRA atau Industri Kreatif Syariah.

Sementara untuk pemberdayaan pesantren, Bank Indonesia Sulsel coba mendorong pesantren yang selama ini sarat dengan aktivitas

pendidikan dan dakwah, menjadi simpul ekonomi yang mampu menopang pengembangan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Potensi itu pun coba dioptimalkan BI Sulsel melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi pesantren lewat penguatan kelembagaan, tata kelola keuangan, manajemen koperasi, kemitraan antarpesantren serta konsep one pesantren one product. "Melalui pesantren REWAKO, Bank Indonesia membangun model kemandirian ekonomi yang diharapkan dapat direplikasi oleh pesantren lainnya," ungkap Rizki.

Lebih jauh, Rizki mengaku bahwa, dalam pengembangan ekonomi syariah ke depan, tidak cukup hanya berbicara tentang label halal. Butuh sentuhan tangan inovatif untuk mempertemukan UMKM, pesantren, lembaga keuan-

gan, teknologi, pemerintah, akademisi dan pasar dalam satu rantai nilai yang produktif.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Rizki, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga menekankan pentingnya inovasi, serta penguatan kolaborasi dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Selatan.

Menurut Andi Sudirman, salah satu poin yang penting diperhatikan dalam menggaungkan ekonomi syariah sebagai penopang pertumbuhan berkelanjutan, yakni dengan memperkuat sektor pembiayaannya melalui peningkatan literasi.

Sementara Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menambahkan, dari sisi keuangan syariah, Sulawesi Selatan sejatinya masih sangat besar potensinya untuk berkembang. Hanya saja

tantangannya, lantaran masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah, baik secara nasional maupun di Sulawesi Selatan ini.

Terpisah, Ketua Umum Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Sulawesi Selatan, Nurhayati Aziz, menegaskan, dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan, butuh sinergi dan orkestrasi seluruh elemen untuk bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kolaborasi antara pemerintah, pelaku ekonomi syariah, perbankan syariah, Bank Indonesia, OJK serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar bersama-sama menerapkan dan mengembangkan ekonomi syariah di Sulawesi Selatan secara berkelanjutan," pungkas Nurhayati. (*)

Terima Konsultasi DPRD Jeneponto Terkait PPh 21

► dari Halaman 1

dinilai cukup besar.

Karena itu, Banggar DPRD Jeneponto meminta penjelasan sekaligus simulasi penghitungan secara langsung dari Kanwil DJP Sulselbartra.

Kegiatan yang melibatkan sekitar 40 anggota Banggar DPRD Jeneponto tersebut turut didampingi Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Kanwil DJP Sulselbartra, Ali Zainal Abidin.

Pemaparan teknis dan simulasi penghitungan PPh Pasal 21 disampaikan secara interaktif oleh Fungsional Penyuluh Madya, Andi Ilham Muliawan Mahyudin, bersama Fungsional Penyuluh Muda, Dasa Midharma Putera.

Dari penjelasan dan simulasi yang diberikan, jajaran pimpinan dan anggota Banggar DPRD Jen-

eponto memperoleh pemahaman mengenai mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 yang berlaku.

Dalam pertemuan tersebut juga ditegaskan bahwa pengenalan PPh Pasal 21 bagi anggota DPRD Jeneponto tidak menggunakan ketentuan PPh Final sebagaimana diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2010.

Penghitungan pajaknya mengikuti ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dengan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER). Kanwil DJP Sulselbartra berharap konsultasi ini dapat memperkuat sinergi dan kesamaan pemahaman dengan pemerintah daerah.

Sehingga, pelaksanaan kewajiban perpajakan di lingkungan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (eky/rif)

Pembangunan Jembatan Barombong Terkendala Status Lahan

► dari Halaman 1

mengklaim penguasaan atas lahan itu dengan dasar kepemilikan dokumen atau sertipikat. Kondisi ini membuat Pemkot Makassar harus memastikan terlebih dahulu siapa pihak yang secara sah berhak menerima pembayaran dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan.

Appi menjelaskan, secara umum

terdapat perbedaan kondisi antara sisi utara dan sisi selatan lokasi pembangunan Jembatan Barombong. Untuk lahan di bagian Utara tidak terdapat persoalan berarti dan relatif sudah clear and clean.

Persoalan justru ditemukan pada bagian selatan jembatan. "Untuk lahan di utara Jembatan Barombong no problem, clear and clean. Fokus bagian

selatan jembatan ada tiga kepemilikan landasan jembatan," ungkapnya.

Jika datang dari arah Makassar menuju Barombong, terdapat lahan di sisi kanan yang akan menjadi bagian dari landasan jembatan. Lahan ini diketahui berkaitan dengan kepemilikan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Namun setelah melewati bagian itu,

muncul persoalan lain, dimana warga klaim kepemilikan dari sejumlah pihak atas lahan yang berada di lokasi rencana pembangunan. Persoalan menjadi semakin kompleks setelah ditemukan adanya dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) di lokasi itu.

"Ketika menyeberang ke sebelah, terdapat kepemilikan yang diakui oleh beberapa pihak di sebelah sana.

Terakhir, muncul lagi ternyata ada HGB GMTD di sana," kata Appi.

Kondisi inilah yang kini harus dipas-tikan Pemkot bersama BPN Makassar agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pemkot tidak ingin proses pembayaran pengadaan tanah dilakukan kepada pihak yang ternyata bukan pemilik sah lahan.

Karena itu, persoalan status dan ri-

wayat kepemilikan tanah harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum tahapan pembebasan lahan dilanjutkan.

"Hal inilah yang menurut saya harus kita pastikan bagaimana kondisi ini bisa kita selesaikan, karena kami harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam rangka penyediaan lahan untuk landasan jembatan," katanya. (rul/rif)

EDUKASI

UNM Lepas 300 Mahasiswa KKN Tematik Literasi

■ Hasil Kerjasama dengan Perpustakaan RI

MAKASSAR, UPEKS-- Universitas Negeri Makassar (UNM) resmi melepas 300 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi ke sejumlah daerah di Sulsel. Pelepasan ini merupakan bagian dari total 3.110 mahasiswa KKN yang terdiri atas KKN reguler, KKN terpadu, dan KKN tematik di Ballroom Teater Menara Pinisi UNM, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan ini dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikristek Prof. Khairul Munadi, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Prof. E. Aminuddin Aziz serta Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar. Turut hadir Plt Rektor UNM, Prof. Farida Patittingi beserta

jajarannya.

Kepala Pusat KKN UNM, Suarlin, mengatakan 3.110 mahasiswa ini berasal dari sejumlah fakultas. Rinciannya, FMIPA 46 mahasiswa, FBS 102, FSD 126, FEB 211, FIKK 306, FT 489, FIS-H 720, dan FIP 1.110 mahasiswa.

Ratusan mahasiswa tersebut akan disebar ke delapan kabu-



LEPAS KKN. UNM resmi melepas 300 mahasiswa KKN Tematik Literasi ke sejumlah daerah di Sulsel. Pelepasan berlangsung di Ballroom Teater Menara Pinisi UNM, Kamis (3/9/2026).

YPI Mega Rezky Bangun Kampus Baru Polimerz

MAKASSAR, UPEKS-- Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Mega Rezky Makassar memulai pembangunan kampus baru Politeknik Kesehatan Megarezky (Polimerz) di Kelurahan Tamangapa Raya, Kota Makassar. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama yang berlangsung Kamis (3/9/2026).

Pembangunan kampus baru ini menjadi bagian dari langkah YPI Mega Rezky Makassar memperkuat infrastruktur pendidikan kesehatan. Fasilitas baru itu diarahkan untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang modern, representatif serta menunjang peningkatan mutu akademik. Proseksi groundbreaking dihadiri

jajaran pimpinan YPI Mega Rezky, yakni Pembina, Alimuddin, Sekretaris Siti Nurul Haliza dan Pengawas, Moch Fikhrum Noer Alimuddin. Hadir pula Rektor Universitas Megarezky (Unimerz), Wakil Rektor IV, Direktur Pascasarjana, Julia Fitri-aningsih serta pimpinan dan sivitas akademika Polimerz.

Turut hadir perwakilan SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar, Klinik Pratama Megarezky, dan Abigail Preschool. Kehadiran jajaran lembaga pendidikan dan layanan kesehatan tersebut menunjukkan dukungan terhadap pengembangan ekosistem pendidikan yang terintegrasi di

lingkungan YPI Mega Rezky.

Direktur Polimerz, Hairuddin K mengatakan, pembangunan kampus baru merupakan investasi strategis bagi masa depan pendidikan kesehatan. Menurutnya, gedung baru tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas proses pendidikan.

"Ini bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi pembangunan masa depan Polimerz. Kami ingin menghadirkan lingkungan akademik yang semakin representatif untuk mendukung pembelajaran, praktik, penelitian, inovasi, dan pengembangan kompetensi mahasiswa," ujarnya.

Sekretaris YPI Mega Rezky Makassar, Siti Nurul Haliza menegaskan dukungan yayasan terhadap pembangunan tersebut. Ia mengatakan, pengembangan sarana dan prasarana akan berjalan seiring dengan peningkatan mutu akademik untuk melahirkan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional sesuai kebutuhan dunia kesehatan.

"Yayasan berkomitmen mendukung pengembangan Polimerz. Pembangunan ini merupakan investasi pendidikan untuk melahirkan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, profesional, dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat," ungkapnya. (*)



KAMPUS BARU. YPI Mega Rezky Makassar memulai pembangunan kampus baru Polimerz di Kelurahan Tamangapa Raya, Kota Makassar. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama yang berlangsung Kamis (3/9/2026).

BAWASLU

MK Uji Aturan 30% Perempuan



MATERIIL. Suasana sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (2/9/2026).

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadiri sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja hadir bersama Anggota Bawaslu Totok Hariyono dan Herwyn JH Malonda dalam sidang pleno perkara Nomor 265/PUU-XXIV/2026 tersebut.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan Mahkamah telah menerima keterangan tambahan yang disampaikan KPU dan Bawaslu secara tertulis. Karena itu, keterangan kedua lembaga tersebut dianggap telah dibacakan dalam persidangan.

"Kami majelis memutuskan keterangan tambahan KPU dan Bawaslu sudah kami terima dan dianggap sudah dibacakan. Kehadiran Bapak/Ibu sekali-kali tetap kami harapkan karena kami akan minta konfirmasi dan keterangan tambahan lainnya," ujar Suhartoyo.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan pemohon. Keterangan tambahan Bawaslu tetap menjadi bagian dari pemeriksaan perkara dan dapat dikonfirmasi Majelis Hakim apabila diperlukan dalam proses persidangan.

Perkara Nomor 265/PUU-XXIV/2026 merupakan pengujian materiil terhadap sejumlah ketentuan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan tambahan Pihak Terkait KPU dan Bawaslu, keterangan DPR, serta ahli dan/atau saksi Pemohon.

Pada sidang sebelumnya, Bawaslu telah menyampaikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan dan langkah yang dilakukan dalam proses pembentukan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, termasuk upaya mendorong keterwakilan perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (jir)

SENAYAN

Rudianto Lallo Dorong Penguatan Anggaran BNN



RUDIANTO LALLO

ANGGOTA Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung penambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tahun anggaran 2027, dengan catatan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi pencegahan dan penindakan. Di samping itu, ia juga menyoroti kebutuhan anggaran BNN Provinsi (BNNP) di daerah yang dinilai masih belum proporsional.

Rudianto mengatakan, penguatan anggaran BNN di daerah penting karena jajaran BNNP memiliki peran langsung dalam upaya pemberantasan narkotika. Ia mengaku kerap menerima keluhan mengenai keterbatasan anggaran ketika melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah.

"Untuk BNN, kami setuju penambahan anggaran 2027, dengan catatan pula memperkuat penjagaan (pencegahan,red) dan penindakan pemerintah Satarkoba, termasuk penambahan anggaran untuk eksistensi BNNP di wilayah," ujar Rudianto Rapat Kerja (Raker) Komisi III bersama Ketua KPK dan Kepala BNN di Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan hasil pembahasan Komisi III DPR RI, BNN mendapatkan pagu anggaran tahun 2027 yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp1,447 triliun. Komisi III kemudian menyetujui usulan tambahan anggaran BNN sebesar Rp5,050 triliun, sehingga total anggaran BNN menjadi Rp6,497 triliun.

Menurut Rudianto, perhatian terhadap alokasi anggaran di tingkat wilayah tidak boleh dabaikan. Sebab, BNNP di berbagai daerah menjadi salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pemberantasan narkotika, sementara kebutuhan operasional di lapangan cukup besar.

"Karena setiap kami turun ke wilayah selalu mengeluh soal anggaran ini. Harus proporsional anggaran yang diberikan kepada masing-masing wilayah BNNP di seluruh Indonesia," kata Rudianto.

Senada, Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbaleka juga menilai penambahan anggaran bagi BNN perlu mendapat perhatian. Pasalnya, lembaga tersebut dinilai mampu menjalankan langkah-langkah penindakan meski menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, pemberantasan narkotika juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. (jir)

Perburuan Kursi Rektor UNM Dimulai

Penjaringan Kandidat Resmi Dibuka

MAKASSAR, UPEKS -- Universitas Negeri Makassar (UNM) resmi memulai tahapan pemilihan calon rektor periode 2027-2031. Proses tersebut diawali dengan pengumuman dan sosialisasi Peraturan Senat terkait pemilihan rektor kepada publik pada Kamis (3/9/2026).

Tahapan pemilihan rektor ini disosialisasikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Phinisi UNM. Ketua Senat UNM, Dr. Resekiani Mas Bakar, S.Psi., M.Psi., Psikolog, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Senat dalam memastikan seluruh tahapan penjaringan rektor dapat diketahui oleh masyarakat.

Menurutnya, seluruh proses pemilihan mengacu pada Peraturan Senat UNM serta regulasi Menteri yang mengatur tentang pengangkatan pimpinan perguruan tinggi negeri. "Dalam rangka proses pelaksanaan pemilihan rektor, kami terus berkoordinasi, berkolaborasi, dan meminta arahan kementerian agar pelaksanaan berlangsung dalam koridor transparan," ujar Resekiani.

Ia menegaskan, pemilihan rektor tidak semata-mata menjadi agenda pergantian pimpinan di lingkungan universitas. Lebih dari itu, proses tersebut akan menentukan arah dan masa depan UNM dalam beberapa tahun mendatang. "Pemilihan rektor bukan sekadar

pergantian pemimpin, tapi juga menentukan arah universitas pada tahun-tahun mendatang. Kami di Senat berkomitmen menjaga integritas seluruh proses," katanya.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor UNM, Prof. Dr. Ir. Andi Muhammad Ikhwan, S.T., M.T., IPM, menambahkan bahwa integritas menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan calon rektor yang akan dipilih.

Ia mengatakan, anggota Senat akan mempertimbangkan sejumlah kriteria, termasuk integritas, kejujuran, dan komitmen para calon. "Jadi kami akan memilih tentunya calon rektor yang betul-betul memiliki kriteria-kriteria seperti ini," ujarnya.

Menurut Ikhwan, penilaian terhadap calon rektor akan dilakukan melalui berbagai tahapan. Salah satunya ketika para kandidat menapakan visi, misi, dan program kerja di hadapan Senat. "Dan tentunya nanti akan didukung dengan pada saat dia akan memaparkan visi-misi, itu. Penilaian kami lakukan penting, karena wujud dari satu suara yang kami miliki itu akan menentukan masa depan Universitas Negeri Makassar," katanya.

Ia menjelaskan, proses penilaian bahkan telah dimulai sejak para bakal calon mendaftar diri dan dinyatakan lolos secara administratif. Anggota Senat, kata dia, akan mencermati rekam jejak dan berbagai pertimbangan lain



PILREK. Panitia tahapan pemilihan calon rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) periode 2027-2031. Panitia mulai membuka secara resmi penjaringan kandidat pada Kamis (3/9/2026) kemarin.

untuk menentukan pilihannya.

Ikhwan menegaskan, suara yang dimiliki anggota Senat dalam pemilihan bukan hanya menentukan sosok rektor terpilih, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membawa UNM menuju arah yang lebih baik. "Sudah melakukan penilaian terhadap apa kira-kira yang menjadi pilihan bagi kami, sehingga betul-betul kami mengantar Universitas Negeri Makassar untuk satu pimpinan yang betul-betul bisa memberikan terbaik untuk Universitas Negeri Makassar," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor UNM, Prof. Dr. Herman S.Pd., M.Pd., memaparkan secara rinci jadwal dan tahapan pemilihan Rektor UNM periode 2027-2031.

Tahapan pertama adalah penjaringan yang dimulai pada 3 September 2026 melalui pengumuman dan sosialisasi Peraturan Senat kepada media cetak, media elektronik UNM, serta laman resmi universitas.

Selanjutnya, pada 4-18 September 2026, panitia akan melakukan sosialisasi ke seluruh unit UNM, termasuk fakultas, Pascasarjana, Kampus V, dan Kampus VI. Sosialisasi juga ditujukan kepada dosen UNM yang memenuhi persyaratan serta perguruan tinggi lain di Indonesia.

Pendaftaran bakal calon rektor dijadwalkan berlangsung pada 21 September hingga 9 Oktober 2026. Apabila jumlah pendaftar kurang dari empat orang, pendaftaran akan diperpanjang pada 12-14 Oktober 2026.

Para bakal calon kemudian akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada 15-23 Oktober 2026 di RUMAH sakit yang ditetapkan. Hasil tahap peninjauan berupa penetapan bakal calon rektor dijadwalkan pada 28 Oktober 2026, dilanjutkan pengumuman dan sosialisasi hasil penjaringan pada 28-29 Oktober 2026.

Tahap berikutnya adalah penayangan yang berlangsung mulai awal November 2026. Penyampaian visi, misi, dan program kerja dijadwalkan pada 2-3 November,

sedangkan penilaian dan penetapan bakal calon rektor akan dilaksanakan pada 4 November.

Panitia kemudian akan menyampaikan tiga nama calon rektor kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 9-10 November 2026.

Setelah itu, tahapan memasuki masa tenang yang berlangsung hingga 16 Desember 2026. Pemilihan calon rektor bersama Mendikisaintek dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2026. Pada hari yang sama, panitia akan menyusun berita acara, mengumumkan hasil, serta melaporkan hasil pemilihan kepada Mendikisaintek.

Berdasarkan jadwal yang disampaikan panitia, masa jabatan Pelaksana Tugas Rektor UNM akan berakhir pada 23 Januari 2027. Sementara penetapan dan pelantikan Rektor UNM periode 2027-2031 direncanakan berlangsung pada Januari 2027 oleh Mendikisaintek dengan menyesuaikan jadwal Menteri. (jir)

DPRD Ingin Perilaku Sosial LGBT Diatur dalam Perda HIV



dr. FAHRIZAL ARRAHMAN HUSAIN

MAKASSAR, UPEKS -- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di DPRD Kota Makassar turut menyoroti faktor perilaku sosial yang dinilai berkaitan dengan pencegahan dan penularan HIV.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, mengatakan pembahasan mengenai perilaku sosial tersebut menjadi salah satu rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Raperda HIV dan IMS. "Sehingga, memang karena kemarin kan pas paripurna jemaah sempat menyinggung itu. Jadi, itu rekomendasi dari Pansus. Nah, menanggapi kemarin hasil dari rapat Raperda HIV itu, memang ada beberapa kendala semestinya di situ," kata Fahrizal.

Menurutnya, salah satu ken-

dala dalam pembahasan adalah belum adanya dasar hukum yang dinilai cukup kuat untuk mengatur persoalan LGBT secara spesifik. Karena itu, pembahasan diarahkan pada aspek perilaku sosial yang berkaitan dengan faktor risiko HIV dan IMS.

"Nah, pada kenapa saat pembahasan Raperda HIV ini dikaitkan dengan LGBT? Karena kami meminta bahwa ada kaitan dari penyebab ataupun pencegahan untuk mengurangi HIV itu, salah satunya dari mengurangi jumlah LGBT," katanya.

Namun, ia menyebut tim ahli Pansus memberikan pertimbangan bahwa LGBT tidak dikategorikan sebagai penyakit. Karena itu, penggunaan istilah tersebut secara langsung dalam Raperda dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses harmonisasi regulasi.

"Sehingga jika digabungkan dengan HIV dan IMS kan ini Pansusnya HIV dan IMS (infeksi menular seksual) sehingga kalau dimasukkan LGBT di dalam situ, kemungkinan besar terolaknya itu lebih tinggi dari nanti jika disamakan di Kemenkumham," katanya.

Karena itu, pihaknya mengusulkan agar substansi mengenai perilaku sosial yang dianggap berkaitan dengan faktor risiko HIV dan IMS dimuat dalam pasal-pasal Raperda tanpa secara spesifik menggunakan istilah LGBT. (jir)

Yasir Machmud Optimistis Tembus Senayan Lewat Dapil 2

MAKASSAR, UPEKS -- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Gerindra, Yasir Machmud menegaskan akan naik kelas ke Senayan dengan maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu 2029 melalui daerah pemilihan (dapil) Sulsel 2.

Yasir Machmud menyambut optimistis rencana Gerindra menghadapi Pemilu 2029, khususnya perebutan kursi DPR RI dari dapil Sulsel 2. Menurut Yasir, Gerindra memiliki sejumlah kader dengan kapasitas dan rekam jejak yang kuat untuk bertarung di partai tersebut.

"Untuk kursi DPR RI di Sulsel 2, saya melihat orang-orang yang akan dipasang sebagai calon legislatif Partai Gerindra memiliki kapasitas yang luar biasa," ujar Yasir.

Ia memilih tidak menyebutkan satu per satu nama calon yang akan diusung. Namun, Yasir memastikan para kader yang dipersiapkan partai memiliki kapasitas dan rekam jejak di Sulawesi Selatan.

"Saya tidak perlu menyebutkan satu per satu siapa saja orangnya. Tetapi gambarannya, mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas dan rekam jejak di Sulawesi Selatan," katanya.

Karena itu, Yasir menilai peluang Gerindra untuk merebut kursi DPR RI dari dapil Sulsel 2 sangat terbuka. Ia juga tidak



BIMTEK. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Gerindra, Yasir Machmud saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) dan peningkatan kapasitas kader DPD Gerindra Sulsel bertajuk "Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah" di Hotel Arthama Makassar, Rabu (2/9/2026).

sepakat dengan anggapan yang menyebut Sulsel 2 sebagai "dapil neraka" karena persaingan politik yang ketat. "Kalau ada yang menyebut Sulsel 2 sebagai dapil neraka, saya justru menyebutnya dapil surga," ujar Yasir.

Menurutnya, istilah tersebut menggambarkan harapan agar seluruh proses politik berlangsung aman, tenteram, nyaman, dan penuh persaudaraan.

"Kalau neraka itu panas. Kita tentu ingin berkampanye dengan aman, tenteram, dan semuanya berjalan dengan baik, nyaman, serta penuh persaudaraan, seperti suasana di surga," katanya.

Yasir menegaskan persaingan dalam Pemilu 2029 tidak perlu

dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Ia optimistis Gerindra mampu meraih suara maksimal dan memenangkan kursi DPR RI dari dapil Sulsel 2. "Insyaallah, kita optimistis dapat meraih suara sebanyak-banyaknya dan memenangkan kursi untuk Partai Gerindra di Sulsel 2," tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh calon agar membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta menjaga suasana politik tetap sehat dan kondusif.

"Yang paling penting adalah seluruh calon bekerja dengan baik, membangun komunikasi dengan masyarakat, dan tetap menjaga suasana politik yang sehat serta kondusif," pungkas Yasir. (jir)

Punya Modal Sosial, Appi Buat Golkar Dilema

MAKASSAR, UPEKS -- Wacana Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meninggalkan Partai Golkar dan bergabung dengan Partai Demokrat terus menjadi perhatian. Di tengah belum adanya kepastian mengenai arah politik tersebut, Appi justru dinilai memiliki posisi tawar yang menguntungkan.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syahrir Karim, mengatakan Appi memiliki sejumlah modal yang membuat posisinya relatif kuat dalam menghadapi dinamika politik antarpantai.

Ia menilai Appi tidak memiliki urgensi untuk segera mengumumkan keputusan politiknya. Ketidakpastian itu justru membuat spekulasi mengenai masa depan politiknya terus berkembang dan menjadi konsumsi publik. "Appi ini punya modal sosial, ekonomi,



SALAM MERCY. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi bersama sejumlah pengurus Partai Demokrat Kota Makassar menunjukkan salam mercy yang merupakan simbol Partai Demokrat.

dan politik yang membuat dia punya bargaining secara politik yang kuat," ujar Syahrir.

Menurut Syahrir, kondisi tersebut memungkinkan Appi mengambil sikap menunggu perkembangan situasi. Ia melihat Appi dapat memanfaatkan momentum

tersebut untuk membaca sejauh mana kepentingan dan respons partai politik terhadap dirinya. "Appi tenang-tenang saja, wait and see. Seolah Appi ini membiarkan bola itu liar di luar sana sambil membawa pesan, hati-hati, parpol di luar sana sudah

rebutan," katanya.

Situasi itu, lanjut Syahrir, juga berpotensi menempatkan Golkar dalam posisi dilematis. Sebagai kepala daerah sekaligus figur yang memiliki pengaruh politik di Makassar, keberadaan Appi dinilai memiliki arti penting bagi kekuatan Golkar di Sulawesi Selatan.

Karena itu, Syahrir meminta Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) alias Aco tidak gegabah merespons perkembangan tersebut. Menurut dia, IAS yang baru memimpin Golkar Sulsel menghadapi target politik partai yang tidak ringan.

Kondisi tersebut membutuhkan perhitungan matang, terutama dalam membaca peta kekuatan politik dan kepentingan partai lain di Sulawesi Selatan. "Sebaliknya Aco ini harus hati-hati. Sebagai ketua DPD yang baru

dengan beban target partai yang diemban, harus punya kalkulasi politik yang baik," ujarnya.

Syahrir mengatakan Golkar perlu mempertimbangkan langkah politik partai lain yang mulai membangun kekuatan dengan mengamankan sejumlah kepala daerah.

Menurutnya, strategi tersebut penting diperhatikan jika Golkar ingin mempertahankan pengaruh politiknya, termasuk menjaga Appi tetap berada di dalam partai. "Seharusnya seperti itu," ujar Dosen FISIP UIN Alauddin Makassar ini menekankan.

Di sisi lain, apabila Demokrat berhasil menarik Appi, keuntungan politik yang diperoleh tidak sekadar bertambahnya jumlah kader. Appi dinilai dapat memberikan tambahan kekuatan elektoral bagi Demokrat, khususnya di Kota Makassar. (jir)